

SKRIPSI

**POLA KEMITRAAN PEMERINTAH DESA DENGAN MASYARAKAT
DALAM PENGELOLAAN RUMAH ADAT UMA NCUHI UNTUK
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DI DESA MBAWA
KECAMATAN DONGGO KABUPATEN BIMA**



Disusun dan diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh derajat Sarjana
Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

OLEH

SUSISUSANTI
NIM. 217130027

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**POLA KEMITRAAN PEMERINTAH DESA DENGAN MASYARAKAT
DALAM PENGELOLAAN RUMAH ADAT UMA NCUHI UNTUK
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DI DESA MBAWA
KECAMATAN DONGGO KABUPATEN BIMA**



Disusun dan diajukan oleh:

SUSISUSANTI
NIM. 217130027

**PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada Ujian Skripsi
Mataram, 11 Februari 2021

Menyetujui,

Pembimbing I,

Drs. Amil, MM.
NIDN. 0831126304

Pembimbing II,

Rohana, S.IP., M.IP.
NIDN. 0831128508

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Ayatullah-Hadi, S.IP., M.IP.
NIDN. 0816057902

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**POLA KEMITRAAN PEMERINTAH DESA DENGAN MASYARAKAT
DALAM PENGELOLAAN RUMAH ADAT UMA NCUHI UNTUK
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DI DESA MBAWA
KECAMATAN DONGGO KABUPATEN BIMA**

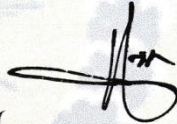
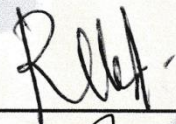
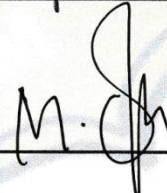


Disusun dan diajukan oleh:

SUSISUSANTI
NIM. 217130027

Telah dipertahankan dalam Ujian Skripsi pada tanggal, 15 Februari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim penguji:

1. **Drs. Amil, MM.** (PU) 
NIDN. 0831126304
2. **Rohana, S.IP.,M.IP.** (PU) 
NIDN. 0831128508
3. **M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP.,M.AP.** (PN) 
NIDN. 0809039203

**Mengesahkan,
Fakultas ilmu sosial dan Ilmu politik
Universitas muhammadiyah mataram
Dekan,**



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si.
NIDN. 0806066801

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa:

Nama : Susisusanti

NIM : 217130027

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Memang benar skripsi yang berjudul “Pola Kemitraan Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Dalam Pengelolaan Rumah Adat Uma Ncuhi Untuk Mewujudkan Pembangunan Pariwisata Di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima” adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di tempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing. Jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Jika kemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya siap mempertanggungjawabkannya, termasuk bersedia menanggalkan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 15 Februari 2021



Susisusanti
NIM. 217130027



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susisusanti
NIM : 217130027
Tempat/Tgl Lahir : Kamunti, 20-01-1997
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fisipol
No. Hp/Email : 085 337 746 533 / susisucantygt@gmail.com
Judul Penelitian : -

pola kemitraan pemerintah Desa dengan masyarakat dalam pengelolaan rumah adat Uma Nuhii untuk mendukung pembangunan pariwisata di Desa Mawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 81% 68% 49%.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya **bersedia menerima sanksi** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : Senin, 15 Maret 2021

Penulis



Susisusanti
NIM. 217130027

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susisusanti
NIM : 217130027
Tempat/Tgl Lahir : Kamunti, 20-01-1997
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fisipol
No. Hp/Email : 085.337.246.533 / Susisucanty07@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

*Pola Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Dalam Pengelolaan Rumah
Abat Uma Ncuti untuk Mewujudkan Pembangunan Pariwisata Di Desa
Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima*

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : *Senin, 15 Maret 2021*

Penulis



Susisusanti
NIM. *217130027*

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua” (Aristoteles)

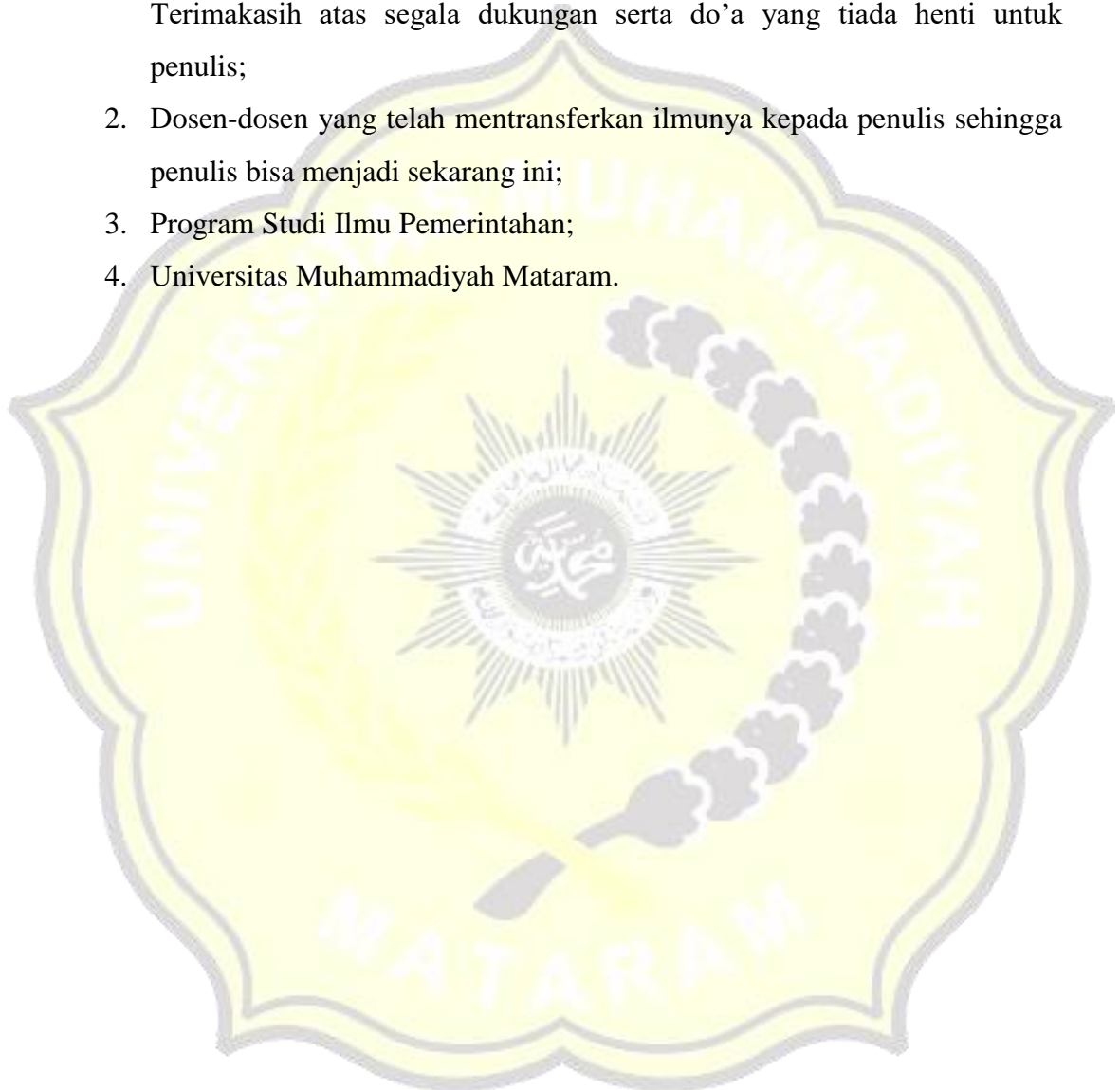
“Bilakau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan” (Imam Syafi’i)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dengan bangga penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Durahim dan Ibu Ante beserta keluarga yang senantiasa memberi motivasi, dukungan dan berjuang tanpa kenal lelah. Terimakasih atas segala dukungan serta do'a yang tiada henti untuk penulis;
2. Dosen-dosen yang telah mentransferkan ilmunya kepada penulis sehingga penulis bisa menjadi sekarang ini;
3. Program Studi Ilmu Pemerintahan;
4. Universitas Muhammadiyah Mataram.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan, sehingga skripsi yang berjudul “Pola Kemitraan Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Dalam Pengelolaan Rumah Adat Uma Ncuhi Untuk Mewujudkan Pembangunan Pariwisata Di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima” dapat diselesaikan oleh penulis. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Ilmu Pemerintahan dan menjadi syarat untuk memperoleh gelar sarjana ilmu pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah banyak membantu terutama kepada;

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram;
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP. selaku Ketua Pogram Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Drs. Amil, MM. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan baik hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Rohana, S.IP.,M.IP. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dengan baik hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Orang tua yang tak henti-hentinya selalu mendoakan dan memotivasi untuk senantiasa bersemangat dan tak mengenal kata putus asa. Terima kasih atas segala dukungannya, baik secara material maupun spiritual hingga terselesaikannya skripsi ini.

7. Kakak ku tercinta Karmin, Eriwati, dan Haris juga anggota keluarga lainnya dan kerabat yang senantiasa memberikan kasih sayang, do'a dan dukungan semangat kepada penulis;
8. Hans Putra, S.Pd yang selalu memberi semangat dan dukungan pada saya;
9. Sahabat dan rekan seperjuangan yang tiada henti memberi dukungan dan motivasi kepada penulis; dan
10. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan, sehingga diharapkan kritik, dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif, memberikan inspirasi dan bermanfaat bagi semua pihak.

Mataram, 15 Februari 2021

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola yang terjalin pemerintah desa dengan masyarakat dalam pengelolaan rumah adat uma.ncuhi serta upaya pemerintah desa dengan masyarakat dalam pengelolaan rumah adat uma.ncuhi untuk mewujudkan pembangunan pariwisata di desa mbawa kecamatan donggo kabupaten bima. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, Pola Kemitraan Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Dalam Pengelolaan Rumah Adat Uma Ncuhi Untuk Mewujudkan Pembangunan Pariwisata di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima belum berjalan dengan baik. Pada dasarnya baik itu Pemerintah Desa maupun Masyarakat belum memahami dengan benar esensi kemitraan dan tujuan dari kemitraan itu bagi proses pembangunan kepariwisataan. Penyebabnya antara lain, yakni masih terdapat ego sektoral, rendahnya pemahaman, dan tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang hal tersebut. Hal ini mempengaruhi proses pembangunan dan perwujudan Rumah Adat Uma Ncuhi sebagai destinasi Pariwisata Desa Mbawa. *Kedua*, upaya Pemerintah Desa dalam membangun Kepariwisata di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima dilihat melalui Pembangunan Atraksi, Aksebilitas, dan Amenitas wisata. Upaya tersebut dapat dikatakan belum sepenuhnya dilakukan dengan maksimal karena masih ada beberapa kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, kurang memadainya infrastruktur, dan minimnya regulasi yang mengatur penyelenggaraan kepariwisataan di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

Kata Kunci: Kemitraan, Pengelolaan, Rumah Adat Uma Ncuhi.

ABSTRACT

This study aims to determine the trend that exists between the village government and the community in managing the traditional house [*uma.ncuhi*], and the efforts of the village government and the community in managing the conventional home [*uma.ncuhi*], in order to develop the tourism growth in the Mbawa village, Donggo, Bima district. In order to accomplish the study, qualitative analysis techniques are employed, which include descriptive data parsing. Observation, questioning, and documentation were used to collect data.

First, the collaboration trend between the Village Government and the community in the Management of the Uma Ncuhi Traditional House in Mbawa Village, Donggo District, Bima Regency, to achieve tourism growth has not been going well. Essentially, neither the Village Government nor the community clearly understands the partnership's purpose and goals in the tourism development process. There is still sectoral vanity, low awareness, and no legal rules governing this matter, to name a few reasons. It influences the Uma Ncuhi Traditional House's growth and realization as a tourism destination for Mbawa Village. Second, the Village Government's efforts to grow tourism in Mbawa Village, Donggo District, Bima Regency, can be seen in the Development of Attractions, Accessibility, and Tourist Amenities. These attempts, it can be said, have not been carried out to their full potential because there are still several flaws in their implementation. Budget constraints, insufficient facilities, and a lack of regulations regulating tourism implementation in Mbawa Village, Donggo District, Bima Regency have contributed to this.

Keywords: *Partnership, Management, Traditional House [Uma Ncuhi].*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PLAGIARISME	v
PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACK	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Penelitian Relevan	7
2.2 Landasan Teori	11
2.2.1 Kemitraan dan Pola Kemitraan	11
2.2.2 Pemerintah.....	15
2.2.3 Rumah Adat	19
2.2.4 Pembangunan	20
2.2.5 Pariwisata	22
2.2.6 Destinasi Wisata.....	23
2.2.7 Aktor Yang Berperan Dalam Pembangunan Kepariwisataaan	24
2.2.8 Kerangka Teori.....	25

BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
3.2 Jenis Penelitian	27
3.3 Teknik Pengumpulan Data	28
3.4 Informan Penelitian	28
3.5 Sumber Data	29
3.6 Analisis data	30
BAB HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
4.2 Pola Kemitraan Yang Terjalin Antara Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Dalam Pengelolaan Rumah Adat Uma Ncuhi Untuk Mewujudkan Pembangunan Pariwisata Di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima	34
4.3 Upaya Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Dalam Pengelolaan Rumah Adat Uma Ncuhi Untuk Mewujudkan Pembangunan Pariwisata Di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	55
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	60

DAFTAR TABEL

Tabel keadaan penduduk desa mbawa tahun 2020 33



DAFTAR GAMBAR

Gambar skema kerangka penelitian 26



BAB I

PENDHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara Indonesia yang termaksud dalam alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka Pemerintah selaku pelayan publik merupakan salah satu unsur yang memiliki peran penting dalam mewujudkan.

Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut, Ryaas Rasyid (2000: 13) membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian yaitu melakukan pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan pengaturan. Pada fungsi pembangunan, Pemerintah diharapkan mampu menyejahterakan rakyatnya melalui pembangunan fisik maupun non-fisik dengan sasaran-sasaran yang jelas di segala aspek kehidupan masyarakat.

Salah satu sektor yang potensial dan dipandang memiliki prospek yang cerah dalam pembangunan di Indonesia adalah Sektor Pariwisata. Sektor ini dapat memberikan dukungan ekonomi yang kuat terhadap suatu wilayah dan diakui sebagai sektor yang menjanjikan oleh UNWTO (*The United Nation World Tourism Organization*). Setiap daerah yang tersebar di wilayah Indonesia memiliki daya tarik dan keunikan masing-masing yang dapat menjadi nilai jual yang tinggi khususnya di sektor pariwisata. Oleh karena itu, sejak tahun 1978,

Pemerintah terus berusaha mengembangkan kepariwisataan dalam meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja, dan memperkenalkan kebudayaan. Pembinaan serta pengembangan pariwisata dilakukan dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kebudayaan dan kepribadian nasional (Winarno, 2006: 32).

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perda Provinsi NTB. No. 2 Tahun 2016, Tentang Pariwisata Halal Pasal 7 bahwa Pemerintah Daerah dapat mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk pembangunan sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan tentunya dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Bima pun mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah tersebut, salah satunya dengan memberikan dukungan khusus kepada Pemerintah Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bima menetapkan Rumah Adat Uma Ncuhi desa Mbawa sebagai Destinasi Pariwisata mengingat desa Mbawa merupakan wilayah pegunungan yang terletak di Kabupaten Bima yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang potensial dalam pembangunan di sektor kepariwisataannya.

Hal ini pun kemudian menjadi salah satu misi Pemerintah Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima yaitu mewujudkan Desa Mbawa sebagai daerah tujuan wisata atau *tourism destination*. Dengan harapan, bahwa Mbawa dapat menjadi daerah yang unggul di bidang kepariwisataannya, dapat menarik perhatian banyak wisatawan untuk berkunjung dan pada akhirnya akan memberi

dampak positif terhadap pembangunan daerah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

Realitas bahwa Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima memiliki potensi daya tarik wisata baik sumber daya alam maupun budaya yang terbilang cukup banyak dan tersebar di setiap wilayah kecamatan, tentu dapat menunjang sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan efek positif bagi perekonomian masyarakat apabila dikembangkan secara maksimal dan profesional. Akan tetapi, sampai saat ini potensi-potensi wisata yang ada belum seluruhnya disentuh dan dikembangkan dengan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bima. Hal ini berimplikasi pada jumlah kunjungan wisatawan domestik yang berkunjung di Rumah Adat Uma Ncuhi di Desa Mbawa dapat diketahui bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung di Desa Mbawa, Kecamatan Donggo Kabupaten Bima dari tahun 2016-2020 dengan jumlah pengunjung mancanegara 128 pengunjung dan domestik yaitu sebanyak 3426 pengunjung sehingga tidak mengalami peningkatan yang signifikan bahkan cenderung mengalami kenaikan dan penurunan. Adapun jumlah keseluruhan pengunjung wisatawan mancanegara maupun domestik dari tahun 2016-2020 yaitu sebanyak 3620 wisatawan. *Sumber: BPS Kabupaten Bima 2020*

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan pariwisata di suatu daerah dapat dilihat pada pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut. Semakin menarik dan indah kepariwisataan suatu daerah, maka semakin tinggi jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut, dan semakin meningkat pula pendapatan daerah dan perekonomian

masyarakatnya.

Rumah Adat Uma Ncuhi ini berbentuk kerucut yang menyerupai huruf A atau berbentuk segi tiga di mana bagian bawah lebih besar sedangkan bagian atas lebih kecil dan meruncing sebagai simbol bahwa Tuhan yang Esa. Struktur Rumah Adat Uma Ncuhi yaitu rumah adat sederhana pada zaman kuno dinamakan Rumah Adat Uma Ncuhi karena memiliki 4 tiang yang terdiri dari atap bangunan, lantai rumah, dinding dan memiliki satu ruangan di mana pada ruangan tersebut terdapat dapur, dan untuk menyimpan bahan-bahan makanan dan alat dapur dan memiliki satu tangga yang terdiri dari lima anak tangga dan satu pintu.

Rumah Adat Uma Ncuhi yang menjadi tempat yang menarik dikunjungi bagi para wisatawan, karena sejarah yang dimiliki menjadi daya tarik yang unik dan berbeda dari tempat yang lain. Terdapat kegiatan yang baru yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar Rumah Adat Uma Ncuhi yang terjadi secara perlahan namun pasti seiring dengan diadakannya kegiatan wisata tersebut.

Berdasarkan realitas dan penjelasan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang pengelolaan kepariwisataan yang ada di Desa Mbawa Kabupaten Bima dan bagaimana pola kemitraan yang dilakukan oleh para stakeholders yaitu Pemerintah Desa dan Masyarakat yang ada di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima dalam rangka Mewujudkan Pembangunan Pariwisata Di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Berdasarkan uraian tersebut, maka kajian terkait pembangunan, pengelolaan Rumah Adat Uma Ncuhi di desa Mbawa sebagai destinasi Pariwisata perlu diperdalam melalui penelitian yang berjudul **“Pola Kemitraan Pemerintah Desa dengan Masyarakat dalam**

Pengelolaan Rumah Adat Uma Ncuhi Untuk Mewujudkan Pembangunan Pariwisata di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola kemitraan yang terjalin antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat dalam pengelolaan Rumah Adat Uma Ncuhi untuk mewujudkan pembangunan pariwisata di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Desa dengan Masyarakat dalam pengelolaan Rumah Adat Uma Ncuhi untuk mewujudkan pembangunan pariwisata di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah di paparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui bagaimana pola kemitraan pemerintah desa dengan masyarakat dalam pengelolaan Rumah Adat Uma Ncuhi untuk mewujudkan pembangunan pariwisata di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.
2. Ingin mengetahui upaya pemerintah desa dengan masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan Rumah Adat Uma Ncuhi di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada pola kemitraan antara Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan.
2. Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk bahan kajian mengenai kemitraan dan sebagai bahan masukan dalam penelitian kepariwisataan untuk pengembangan ilmu pemerintahan, baik secara umum maupun secara khusus untuk Program Studi Ilmu Pemerintahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi seluruh *Stakeholders* dan menjadi sumbangsih peneliti terhadap proses pemerintahan dalam pengelolaan sektor Pariwisata dan perekonomian masyarakat.
2. Penelitian ini dapat memberi masukan berupa solusi untuk mengurangi permasalahan kepariwisataan, mengembangkan dan memperbaiki pola kemitraan bagi hubungan kemitraan-kemitraan yang ada di Indonesia.
3. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.3 Penelitian Relevan

Untuk mengetahui otentitas penelitian terdahulu dengan sekarang, maka penulis mengemukakan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian saat ini. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Serly Wulandari dan Sari Indah Murwani (2018) yang berjudul “Pola Kemitraan dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah”. Salah satu hal administratif pilihan dalam administrasi pemerintah daerah adalah turis. Dimana dalam proses pembangunannya, pemerintah memberikan ruang kepada establishment kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan yang saling dibutuhkan, saling mendorong dan saling menguntungkan.

Untuk mewujudkan kemitraan tersebut, perlu disepakati dan kerja sama antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Selain itu seharusnya sudah ada perencanaan, strategi dan inovasi dalam mengembangkan kawasan sektor pariwisata, untuk memperbaiki kondisi ekonomi daerah dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik data *collection* melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Informan ditentukan oleh metode *purposive sampling*. Data dianalisis melalui pengurangan data, presentasi data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kemitraan dalam pengembangan pariwisata di Purbalingga telah berjalan cukup baik namun tidak optimal. Hal ini didasarkan pada analisis tiga prinsip penting

kemitraan dan kesetaraan atau keseimbangan, transparansi dan kebersamaan. Model kerja sama yang dibangun oleh perusahaan swasta dan pemerintah dalam pengembangan pariwisata dalam model kemitraan semu, atau persatuan kemitraan bawahan. Faktor yang mempengaruhi sistem kemitraan dalam pengembangan pariwisata di Purbalingga adalah hak dan kewajiban masing-masing pihak, adanya harapan perolehan, pertemuan jangka waktu, pelaksanaan tugas dan kualitas pelayanan. Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Serly Wulandari dan Sari Indah Murwani dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama melakukan penelitian pola kemitraan. Perbedaannya adalah lokasi penelitian yang dilakukan oleh Serly Wulandari dan Sari Indah Murwani yaitu di Kabupaten Purbalingga sedangkan yang dilakukan peneliti di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

Penelitian kedua juga dilakukan oleh RR. E. Anggraeni Eksi Wahyuni (2014) yang berjudul “Sinergi Kemitraan Antara Pemerintah, Swasta, Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Pedesaan Tanjung Di Kabupaten Sleman”. Pariwisata pedesaan telah menjadi tren pariwisata baru saat ini. Salah satu wisata pedesaan utama yang telah berkembang di Sleman adalah Wisata Pedesaan Tanjung. Pembangunan telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Tkitaisme bersama masyarakat setempat (masyarakat Tanjung) telah mencapai hasil yang signifikan. Namun, hasil pengembangan ini dapat ditingkatkan melalui pengembangan yang lebih intensif. Langkah pembangunan Tanjung Pariwisata Pedesaan dicapai melalui partnership antara pemerintah, swasta dan publik, bahwa tingkat keberhasilan ditentukan oleh pembentukan peran keseimbangan

atau sinergi (hubungan yang harmonis dan seimbang, saling terkait dan mendukung) antara pemerintah, swasta dan publik. Hasil perolehan ED adalah pengembangan Tanjung Wisata Pedesaan telah mengatakan sudah dikelola melalui kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk menciptakan sinergi antara ketiga pelaku. Dengan demikian ada kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat itu bisa dibilang berhasil yang terlibat langsung dalam keberhasilan pengembangan Wisata Pedesaan Tanjung. Ciptakan sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat ditandai dengan indikator sebagai berikut: 1) sifat hubungan terkoordinasi; 2) kesediaan masing-masing aktor untuk saling berbagi informasi; 3) kemampuan untuk merumuskan dan membuat program bersama; 4) kemampuan untuk memeriksa dan memeriksa kembali peran yang dilakukan; dan 5) keseimbangan pembagian peran antara pemerintah, swasta dan publik.

Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh RR. E. Anggraeni Eksi Wahyuni yaitu menunjukkan sinergi antara pemerintah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata), swasta (biro perjalanan wisata) dan masyarakat (masyarakat lokal) dalam pengembangan wisata pedesaan Tanjung. Sedangkan yang peneliti lakukan adalah pola kemitraan pemerintah desa dengan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata rumah adat yang ada di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

Penelitian ketiga juga dilakukan oleh Ami Suswan Putra (2013) yang berjudul "Pola Kemitraan Pariwisata Dalam Manajemen atraksi Desa Wisata Pampang Kota Samarinda" Desa Wisata Pampang merupakan satu-satunya

obyek wisata berbasis budaya di Kota Samarinda. Pengelolaannya seharusnya didukung secara penuh, namun tidak terdapat perkembangan signifikan setelah 20 tahun. Penelitian ini mengidentifikasi karakteristik pola kemitraan dalam manajemen atraksi di Desa Wisata Pampang, serta merumuskan perbaikan yang seharusnya diterapkan. Jenis metode yang digunakan adalah grounded research dengan pendekatan kualitatif. Analisis yang dilakukan meliputi analisis domain, taksonomi, komponensial, tema, dan triangulasi. Hasil penelitian didapatkan model kemitraan tergolong dalam kemitraan semu dan gabungan subordinatif. Pola kemitraan didominasi pola yang bersifat bantuan, meliputi Bantuan Dana Hibah baik fisik maupun program PNPM Mandiri Pariwisata, Investasi Swasta, CSR, Bantuan Pinjaman Dana Bergulir (KUD), Subkontrak dan Dagang Umum.

Manajemen atraksi wisata kurang memberi ruang pengembangan SDM, terlalu membatasi aktivitas pariwisata dengan sosial budaya masyarakat, kurang memanfaatkan teknologi dan minim pengorganisasian komunitas. Oleh sebab itu dirumuskan perbaikan meliputi penggiatan Investasi Swasta, pewardahan agen pembaharu, akademisi, perluasan peran komunitas, pemberian bantuan tabungan dan pinjaman, serta pengaktifan KUD sebagai pemersatu aktivitas. Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ami Suswan Putra menunjukkan karakter kemitraan, diketahui pola yang diterapkan meliputi Investasi Publik berupa Bantuan Dana Hibah baik fisik maupun permodalan, Bantuan Pinjaman Dana bergulir (KUD), Investasi Swasta, CSR, Subkontrak dan Dagang Umum. Adapun pola yang tidak ditemui di lapangan adalah pola Inti Plasma, Waralaba dan Keagenan. Berdasarkan aspek manajemen, secara umum manajemen atraksi di

Desa Wisata Pampang kurang memberi ruang pada pengembangan sumberdaya manusia, memberi pemisahan antara pariwisata dan sosial budaya masyarakat, keterbatasan pemanfaatan teknologi dan minimnya pengorganisasian komunitas masyarakat. Sedang yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan upaya Pemerintah Desa dan masyarakat dalam membangun Kepariwisata rumah adat di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima dilihat melalui Pembangunan Atraksi, Aksebilitas, dan Amenitas wisata.

2.4 Landasan Teori

2.2.9 Kemitraan dan Pola Kemitraan

Secara Harfiah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2012: 692), Kemitraan berasal dari kata Mitra yang berarti teman, kawan kerja, pasangan kerja, dan atau rekan. Jika diberi imbuhan “ke-an”, maka menjadi kata Kemitraan yang artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.

Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Dalam sejarah perkembangan manusia, tidak terdapat seseorang yang bisa hidup sendiri, dan terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun hanyalah untuk sementara waktu. Aristoteles, seorang ahli pikir Yunani Kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia itu adalah *zoon politikon*, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.

Hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi pembawaan manusia, merupakan suatu keharusan badaniah untuk melangsungkan hidupnya, karena tiap manusia mempunyai keperluan sendiri-sendiri dan seringkali keperluan itu searah serta sepadan satu sama lain, sehingga dengan kerjasama, tujuan manusia untuk memenuhi keperluan itu akan lebih mudah dan lekas tercapai.

Menurut Sulistyani, kemitraan dalam perspektif etimologis diadaptasi dari kata *Partnership* dan berasal dari akar kata *partner*, yang berarti “pasangan, jodoh, sekutu, atau komponen”. Sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Dengan demikian, kemitraan dapat dimaknai sebagai satu bentuk persekutuan antara dua belah pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Sumarto bahwa *partnership* adalah hubungan yang terjadi antara *civil society*, pemerintah dan atau sektor swasta dalam rangka mencapai suatu tujuan yang didasarkan pada prinsip kepercayaan, kesetaraan, dan kemandirian.

Sesuai dengan pernyataan Notoatmodjo (2003: 3) menyatakan bahwa kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Terdapat dua pihak atau lebih, merupakan pemerintah, swasta dan masyarakat.
2. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan bersama
3. Ada kesepakatan antara pemerintah dan swasta dalam memberikan efek

positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar.

4. Saling membutuhkan antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat memiliki peran masing-masing.

Adapun dasar pertimbangan diperlukannya kerjasama kemitraan pemerintah, masyarakat dan swasta menurut Utomo (2004: 8) mencakup tiga hal yaitu:

1. Alasan politis yaitu menciptakan pemerintah yang demokratis dan mendorong terwujudnya *good governance*.
2. Alasan administratif yaitu adanya keterbatasan sumber daya pemerintah baik dalam hal anggaran, sumber daya manusia, asset, dan kemampuan manajemen.
3. Alasan ekonomis yakni mengurangi kesenjangan atau ketimpangan, memacu pertumbuhan dan produktivitas, meningkatkan kualitas dan kontinuitas serta mengurangi resiko.

Atas dasar ketiga alasan tersebut di atas maka konsep kerjasama kemitraan yang dijalankan oleh pemerintah, masyarakat dan sektor swasta diharapkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam proses pembangunan di daerah.

Sebagai implementasi dari hubungan kemitraan, dilaksanakan melalui pola-pola kemitraan yang sesuai sifat atau kondisi dan tujuan usaha yang dimitrankan dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, baik di dalam pembinaan maupun pelaksanaan operasionalnya.

Pembinaan kemitraan tersebut sangat berpengaruh terhadap

kebijaksanaan yang berlaku di suatu wilayah, oleh karena itu dukungan kebijaksanaan mutlak diperlukan dalam pelaksanaan kemitraan usaha dan ditunjang operasionalisasi yang baik seperti penjabaran pelaksanaan kemitraan melalui kontrak kerjasama kemitraan dan secara konsisten mengikuti segala kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.

Pola kemitraan menurut Sulistiyani (2004: 129) diilhami dari fenomena biologis kehidupan organisme dan mencoba mengangkat ke dalam pemahaman yang kemudian dibedakan menjadi berikut:

1. *Pseudo partnership* atau kemitraan semu

Kemitraan semu merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.

2. Kemitraan mutualistik

Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal.

Berangkat dari pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua agen/organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda, melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang bekerjasama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, dan sekaligus saling menunjang satu sama lain.

3. Kemitraan Konjugasi

Kemitraan Konjugasi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan “paramecium”. Dua paramecium melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

2.2.10 Pemerintah

Pemerintahan adalah sebuah organisasi yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat serta melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara.

Secara etimologi, pemerintahan dan pemerintah dapat diartikan sebagai

berikut:

1. “Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah. Yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
3. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Pemerintah di Indonesia, dibagi menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan keberadaan desentralisasi yang berlaku pada masing-masing negara dan pemerintahan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga dikatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam melakukan otonomi daerah perlu adanya asas yang harus dijalankan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri.
- 2) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat pemerintah pusat atau pejabat di atasnya (misalnya, wilayah provinsi).
- 3) Tugas pembantuan. Dalam hal ini pemerintah daerah ikut serta mengurus sesuatu urusan tetapi kemudian urusan itu harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat.

Menurut Sarundanjang *local government* di masa depan paling tidak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah yang bercorak wirausaha
Suatu pemerintahan yang memanfaatkan ketiga komponen sumberdaya: pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat.
2. Pemerintah daerah yang memiliki akuntabilitas public
Akuntabilitas yang dimaksud yaitu sebagai kewajiban pemerintah daerah dengan segenap unsur birokrasinya dalam memberikan pertanggung jawaban kepada masyarakat menyangkut berbagai kegiatan pemerintah, termasuk kinerjanya dalam pelayanan publik.

3. Pemerintah daerah yang bercirikan pemerintahan yang baik

Secara teoritis pemerintahan yang baik mengandung makna bahwa pengelolaan kekuasaan didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku, pengambilan kebijaksanaan secara transparan, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.

4. Transparansi dalam pemerintahan daerah

Transparansi bukan berarti ketelanjangan, tetapi keterbukaan dalam arti yang sebenarnya, yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai aktifitas pemerintah daerah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat banyak.

Adapun Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam hal penyelenggaraan Kepariwisataannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataannya adalah, sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
2. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
3. Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka

mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Selanjutnya, juga diatur pada pasal 30 Undang-Undang Kepariwisataaan mengenai wewenang Pemerintah kabupaten/kota dalam hal kepariwisataan, yaitu:

- a) Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- b) Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c) Menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d) Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e) Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f) Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g) Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h) Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i) Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j) Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata;
- k) Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

2.2.11 Rumah Adat

Rumah adat adalah bangunan rumah yang memiliki ciri khas bangunan

suatu daerah di Indonesia yang melambangkan kebudayaan dan masyarakat setempat. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keragaman dan kekayaan budaya, banyak ragam bahasa dan suku dari Sabang sampai Merauke sehingga Indonesia memiliki banyak koleksi arsitektur rumah adat. (Pramono, 2013) Sampai saat ini masih banyak suku atau daerah di Indonesia yang tetap mempertahankan rumah adat sebagai usaha untuk memelihara nilai-nilai budaya yang mulai tergeser oleh budaya modernisasi. Rumah adat tertentu biasanya dijadikan sebagai auala (tempat pertemuan), musium atau dibiarkan begitu saja sebagai objek wisata. (Pramono, 2013) Dalam arsitektur tradisional, tercermin kepribadian masyarakat tradisional, artinya bahwa arsitektur tradisional tersebut tergabung dalam wujud ideal, sosial, material, dan kebudayaan. Sesuai dengan pelestarian adat istiadat dan kebudayaan suatu daerah, maka bersamaan dengan kegiatan tersebut, pelestarian dan perawatan juga dilakukan pada bangunan-bangunan tradisionalnya terutama pada rumah adatnya. (Wahid & Alamsyah, 2013)

2.2.12 Pembangunan

Pengertian pembangunan harus kita lihat secara dinamis, dan bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial ekonomi. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atau kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka.

Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (growth plus change) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang (Subandi: 2011:9-11).

Adapun pembangunan menurut beberapa ahli yaitu: pembangunan menurut Rogers (Rochajat,dkk: 2011:3) adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Selanjutnya menurut W.W Rostow (Abdul: 2004:89) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang kemasyarakat negara yang maju. Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya (Rochajat,dkk : 2011:3).

Dalam bidang sosial, usaha-usaha pembangunan pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan, pembangunan dan pembinaan bangsa. Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi kegairahan usaha yang bersifat produktif. Dan yang lebih penting adalah dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat melalui pembinaan dan dorongan serta adanya energi.

Usaha dalam bidang ekonomi ditujukan untuk menambah peralatan modal dan keterampilan agar satu sama lain dapat saling mendukung usaha-usaha dalam peningkatan pendapatan perkapita serta produktivitas perkapita. Pemupukan modal sangat tergantung pada tabungan dalam negeri, terutama tabungan masyarakat, untuk itu berbagai upaya perlu diupayakan untuk mencapainya (Subandi : 2011:13).

2.2.13 Pariwisata

Bila dilihat dari segi etimologis Pariwisata berasal dari Bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua kata yaitu “Pari” dan “Wisata”. Pari berarti berulang-ulang, berkali-kali atau berputar-putar, sedangkan Wisata berarti perjalanan atau bepergian, jadi Pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan secara berputar-putar, berulang-ulang atau berkali-kali. *The Association Internationale des Experts Scientifique du Tourisme* (AIEST) dalam Suwarjoko (2007: 6), mendefenisikan pariwisata sebagai keseluruhan hubungan dan fenomena yang timbul akibat perjalanan dan pertinggalan (*stay*) para pendatang, namun yang dimaksud pertinggalan bukan berarti untuk bermukim tetap. Hal yang sama diungkapkan oleh Kodyat (2001) bahwa pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Wahab (2003) bahwa pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja peningkatan penghasilan,

standart hidup serta menstimulasi sektorsektor produktivitas lainnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, menyatakan bahwa:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarikwisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

2.2.14 Destinasi Wisata

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan ditentukan bahwa Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang slaing terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataaan. Perkembangan suatu kawasan wisata juga tergantung pada apa yang dimiliki kawasan tersebut untuk dapat ditawarkan kepada wisatawan. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari peranan para pengelola kawasan wisata. Yoeti (1996: 108) berpendapat bahwa berhasilnya suatu tempat wisata hingga tercapainya industri sangat tergantung pada tiga A (3A), yaitu atraksi (*attraction*), keterjangkauan (*accessibility*), dan fasilitas (*amenities*).

Atraksi wisata yaitu sesuatu yang dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat dilihat, dinikmati dan yang termasuk dalam hal ini adalah tari-tarian, nyanyian kesenian rakyat tradisional, upacara adat, dan lain-lain. *Tourism* disebut *attractive spontance*, yaitu segala sesuatu yang terdapat didaerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke suatu tempat tujuan wisata. Akseibilitas (*accessibility*), adalah aktifitas kepariwisataan banyak tergantung pada transportasi dan komunikasi karena faktor jarak dan waktu yang sangat mempengaruhi keinginan seorang untuk melakukan perjalanan wisata. Unsur yang terpenting dalam akseibilitas adalah transportasi sehingga jarak menjadi dekat. Selain transportasi, yang berkaitan dengan akseibilitas adalah prasarana meliputi jalan, jembatan, terminal, stasiun, dan bandara. Prasarana ini berfungsi untuk menghubungkan suatu tempat dengan tempat yang lain. Keberadaan sarana transportasi akan mempengaruhi laju tingkat transportasi itu sendiri. Kondisi prasarana yang baik akan membuat laju transportasi optimal.

Fasilitas adalah pariwisata tidak akan terpisah dengan akomodasi perhotelan. Fasilitas wisata merupakan hal-hal penunjang terciptanya kenyamanan wisatawan untuk dapat mengunjunggi suatu daerah tujuan wisata. Adapun sarana-sarana penting yang berkaitan dengan perkembangan pariwisata yaitu akomodasi penginapan, restoran, air bersih, komunikasi, hiburan, dan keamanan.

2.2.15 Aktor Yang Berperan Dalam Pembangunan Kepariwisata

Good governance adalah sebuah gambaran ideal tentang bagaimana mengelola negara dan aspek-aspek terkait lain yang ada di dalamnya. Untuk mewujudkan *good governance*, diperlukan manajemen penyelenggaraan pemerintah yang baik dan handal, yakni manajemen yang kondusif, responsif dan adaptif. Untuk dapat dikatakan sebagai *good governance*, maka tidak boleh ada satu pihak yang memegang kontrol penuh atas semuanya, sehingga tercipta keseimbangan antar para *stakeholders* dengan memegang prinsip-prinsip dasar.

Dalam sistem Kepariwisata, ada banyak aktor yang berperan dalam menggerakkan sistem. Aktor tersebut adalah insan-insan pariwisata yang ada pada berbagai sektor. Secara umum insan pariwisata dikelompokkan dalam tiga pilar utama, yaitu: (1) Pemerintah, (2) Swasta, (3) Masyarakat.

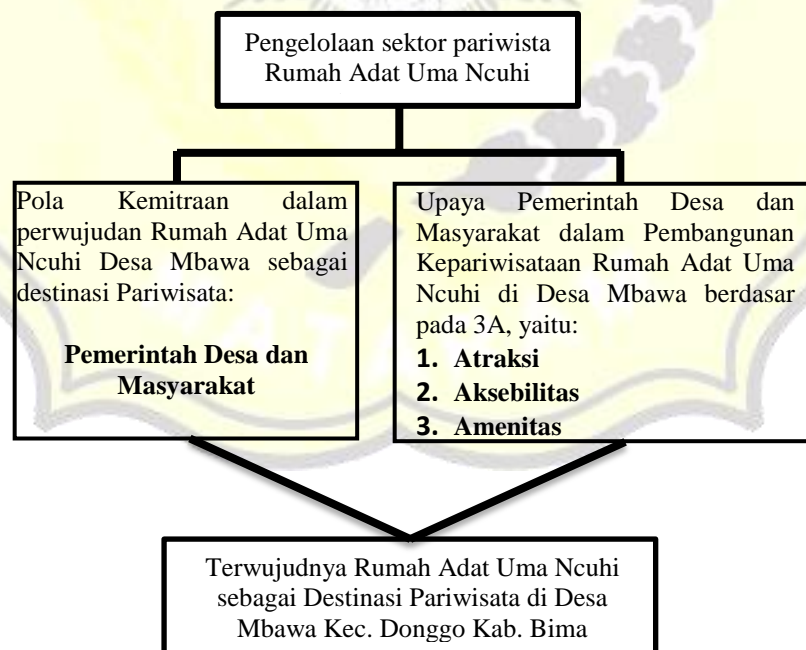
2.2.16 Kerangka Teori

Melaksanakan pembangunan dalam lingkup nasional maupun daerah merupakan salah satu fungsi pemerintahan dalam upaya mencapai tujuan negara. Pemerintah diharapkan mampu mengembangkan dan memaksimalkan segala potensi yang ada untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pariwisata merupakan sektor yang menjanjikan dalam perspektif pembangunan. Hal ini dikarenakan sektor Pariwisata memberikan dukungan ekonomi yang kuat terhadap suatu wilayah. Mengingat banyaknya potensi sumber daya alam serta kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia, maka diundangkanlah Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang mengamanatkan agar sumber daya dan modal kepariwisataan dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja,

mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa (Depbudpar, 2009).

Idealnya, dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pembangunan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi melibatkan sektor swasta dan masyarakat. Begitupun halnya dalam sistem manajemen kepariwisataan, bahwa dalam membangun dan mengembangkan kepariwisataan suatu daerah ada 3 pilar utama yang menjadi aktor penting, yakni pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Maka dari itu, pola kemitraan yang sinergi antar ketiga pilar ini merupakan kekuatan yang kuat dalam pembangunan kepariwisataan. Berikut gambaran singkat pola kemitraan Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan pariwisata Rumah Adat Uma Ncuhi di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

Gambar Skema Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini telah dilaksanakan di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima dan yang menjadi titik pengambilan data penelitian yaitu objek wisata Rumah Adat Uma Ncuhi di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Penelitian ini telah dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan, yakni Januari 2021.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan penjabaran deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta memahami dan menjelaskan Pola Kemitraan Pemerintah Desa Dengan Masyarakat dalam Pengelolaan Rumah Adat Uma Ncuhi Untuk Mewujudkan Pembangunan Pariwisata Di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy J (2004:5), metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dimana data yang terkumpul merupakan hasil dari lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan data primer seperti observasi, wawancara, studi pustaka, dan pengumpulan data sekunder seperti data pendukung yang diperoleh dari arsip/dokumen yang sudah ada atau literatur tulisan yang sangat berkaitan dengan judul penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi

Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Peneliti berkunjung dan mengamati secara langsung objek wisata Rumah Adat Uma Ncuhi yang ada di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

2. Wawancara

Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melalui interview secara langsung dengan informan.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan penelusuran literatur yang berupa buku, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3.4 Informan Penelitian

Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling*, yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki

informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan.

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa Mbawa
2. Ketua Rumah adat
3. Tokoh Masyarakat dan masyarakat sekitar kawasan tempat wisata di desa Mbawa.
4. Beberapa pelaku usaha wisata/pengelola objek wisata Rumah Adat Uma Neuhi
5. Pengguna layanan wisata/wisatawan, para pengunjung objek wisata baik wisatawan lokal maupun mancanegara

3.5 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya atau di lapangan yang merupakan data empirik. Data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian (Lexy Moleong, 2004: 157).

Dalam penelitian ini, antara lain adalah para penyelenggara pemerintahan di Desa Mbawa Kabupaten Bima yang terkait dengan kepariwisataan, Kepala Desa, Bupati, Aparat Pemerintah di Dinas

Pariwisata, Para tokoh yang berkompeten di bidang Pariwisata, pelaku usaha, dan masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literature yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen atau arsip, dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Undang-Undang, RIPPARDA (Rencana Induk Pembangunan Pariwisata) Kabupaten Bima, dokumen-dokumen dan arsip dari dinas pariwisata yang relevan dengan penelitian.

3.6 Analisis data

Dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk label, skema, maupun dalam bentuk narasi (Sugiyono, 2008: 246)